

REFORMASI: ANTARA ANOMIE DAN PENCIPTAAN METANARASI BARU

Oleh Triyono Lukmantoro

Triyono Lukmantoro, lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Oktober 1997. Semenjak bulan Februari 1998, tercatat sebagai staf pengajar pada almamaternya.

Munculnya gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa ditandai oleh bertebarannya ungkapan-ungkapan kasar yang ditujukan kepada Soeharto secara personal, maupun kepada Orde Baru sebagai rezim politik yang totaliter. Namun di balik gelombang reformasi yang memuncak itu, sebenarnya, sedang terjadi anomie yang ditunjukkan oleh aksi- aksi penjarahan serta kekerasan terhadap aparat desa. Selain itu, tanpa disadari reformasi juga merupakan metanarasi baru yang apabila tidak dikritisi akan melahirkan rezim politik yang juga represif.

“Juga bagiku rasanya kata yang paling kasar, surat yang paling kasar adalah lebih bermuatan kebaikan, lebih jujur dibandingkan dengan diam. Mereka yang tinggal dalam diam hampir selalu kekurangan subtilitas dan kesopanan di hati; diam adalah sebuah penolakan, menelan kata-kata pastilah menghasilkan sebuah karakter buruk – itu malah menghancurkan perut.”

(Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo: Lihatlah Dia*, 1998: 20)

Ungkapan Nietzsche mengenai kata-kata kasar yang justru menjadi selera kesentingannya, benar-benar terjadi pada pertengahan Mei 1998 yang lalu. Gelombang reformasi yang dimotori oleh mahasiswa tidak saja telah mampu memproduksi sebuah gerakan massal. Namun yang lebih penting adalah menggelombangnya ucapan-ucapan vulgar yang menghujat Soeharto sebagai personal tunggal maupun Orde Baru sebagai sebuah rezim yang berkarakter totaliter. Kekasaran itu tidak saja terungkap dalam teriakan-teriakan mahasiswa yang menghendaki turunnya Soeharto sebagai presiden yang sangat represif. Tetapi yang lebih mencolok adalah munculnya aksi kekerasan yang berjalan secara massif berupa pengrusakan serta penjarahan, serta terjadi pula tragedi terhadap kalangan perempuan keturunan Tionghoa yang mengalami tindak pemerkosaan.

Apabila dikedepankan pertanyaan yang lebih kritis: Inikah reformasi? Apakah reformasi harus dijalankan dengan cara kekerasan untuk menunjukkan bahwa selama ini memang negara lebih dikuasai oleh aparatus-represifnya? Apakah reformasi yang bergulir pada pertengahan Mei 1998 itu tidak lebih sebagai perlawanan puncak terhadap rezim Orde Baru serta Soeharto sebagai tokoh utamanya? Hipotesis ini dapat dijawab dengan merujuk pada apa yang dikemukakan Foucault bahwa di manapun ada kekuasaan, serentak dengan itu pula ada perlawanan. Dan, perlawanan tersebut tidak pernah berada di luar posisi kekuasaan. Perlawanan yang muncul merupakan suatu hal yang niscaya, tidak mungkin, spontan, liar, soliter, hasil persekongkolan laten, keras, tak kenal kompromi, mudah berkompromi, berpamrih, atau juga rela berkorban (Foucault, 1997: 117-118). Apabila perlawanan yang mengiringi proses reformasi itu berjalan dengan perilaku yang cenderung radikal serta kasar, jelas akibat selama ini masyarakat telah secara sistematis dibungkam dalam diam. Sehingga yang muncul secara eksplosif kemudian adalah teriakan yang telah diisi dengan berbagai dendam serta kemiskinan yang semakin meluas.

Tulisan ini akan membahas dua fenomena pokok yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai gejala utama dari bergulirnya reformasi. *Pertama*, munculnya perlawanan masyarakat di tingkat pedesaan terhadap aparat birokrasi yang selama ini menjadi ujung tombak bagi rezim Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya melalui proses pemilihan umum. Selain perlawanan terhadap kalangan aparat birokrasi yang juga sangat mencolok adalah semakin beraninya masyarakat di daerah pedesaan untuk melakukan penjarahan. Serta fenomena yang *kedua* adalah upaya kalangan pejabat negara untuk melupakan tragedi berdarah yang pernah dilakukannya, seperti Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1994 serta Peristiwa Sabtu Kelabu atau yang lebih dikenal sebagai Tragedi 27 Juli 1996. Proses penglupaan ini sengaja dijadikan mekanisme oleh kalangan pejabat negara seiring dengan tuntutan

dari masyarakat yang menghendaki diungkapkannya kasus-kasus yang menelan banyak korban itu serta menjadi semacam arsip politik yang sengaja disembunyikan oleh rezim Orde Baru.

Perlawanan terhadap Aparat Desa

Adalah sebuah fenomena kekuasaan yang cukup mencengangkan ketika kalangan aparat pedesaan meminta perlindungan kepada aparat pemerintahan di atasnya, baik camat atau pun bupati, karena merasa terancam jiwa dan keamanannya. Apakah gejala yang demikian ini dapat dibaca sebagai arus reformasi yang sedang meraih titik zenithnya dalam kehidupan masyarakat desa? Ataukah masyarakat desa sedang mengalami "demam reformasi", sehingga mereka tidak sungkan-sungkan lagi melakukan kritik bahkan aksi kekerasan terhadap aparatnya sendiri? Dan, ini semua merupakan sebuah peristiwa yang sama sekali tidak terduga ketika kalangan kepala desa beserta perangkatnya tiba-tiba harus mengalami ketakutan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada saat memohon perlindungan mereka pun membawa poster sebagaimana layaknya kalangan aktivis yang mengalami tindakan represif dari aparat keamanan. Kalangan aparat desa pun seakan-akan sedang merintih mengalami kesakitan serta ketakutan yang luar biasa.

Barangkali, inilah sebuah titik balik yang sedikit "janggal". Bagaimana mungkin kalangan aparat yang mempunyai kekuasaan penuh atas masyarakatnya harus mengalami ketakutan yang sedemikian mencekam? Apabila dirunut secara sosiologis, masyarakat pedesaan merupakan sebuah komunitas homogen yang cenderung memberikan rasa hormat (*respect*) terhadap kalangan pemimpinnya. Sehingga berbagai relasi kekuasaan yang menghubungkan antara aparat dengan penduduk pedesaan lebih bersifat emosional, karena lebih dikentali dengan keterkaitan yang bersifat kedekatan personal. Dengan keadaan hubungan-hubungan kekuasaan (*relations of power*) seperti ini, jalinan yang kemudian muncul adalah antara patron dan klien (pihak yang memberikan perlindungan serta pihak yang diberikan pengayoman). Jadi, tidak ada tendensi-tendensi kekuasaan yang mengarah pada eksploitasi dengan memanfaatkan kekuasaan.

Namun, tampaknya, asumsi-asumsi ini segera saja dapat dibantah ketika wilayah pedesaan dijadikan ajang untuk meraih keuntungan. Desa tidak lebih dijadikan salah satu dari bagian kekuasaan di lingkup atasnya. Perkembangan berikutnya adalah desa diaplikasikan sebagai sebuah jaringan kekuasaan yang mengandalkan pada kekuatan birokratisme. Tugas aparat pedesaan pun mengalami perubahan yang sangat drastis, yaitu dari yang semula sebagai pengayom kemudian menjadi penguasa yang juga melakukan perengkuhan terhadap warganya dengan cara-cara yang eksploitatif. Boleh jadi perubahan itu juga diperkeras oleh pergeseran sifat masyarakat desa itu sendiri akibat karakter kekuasaan negara secara keseluruhan. Negara melalui berbagai program pembangunannya, entah dengan kesadaran penuh atau tanpa diperhitungkan sebelumnya, mendorong masyarakat desa yang semula bersifat paguyuban (*gemeinschaft*) menjadi masyarakat yang berkarakterkan patembayan (*gesellschaft*). Hubungan-hubungan kuasa yang pada awalnya tidak pernah dimuati oleh pamrih untuk mendapatkan keuntungan (dalam hal ini, tentu saja, adalah profit yang bersifat material) secara mendadak diubah arahnya menjadi relasi-relasi yang selalu mengarah pada pemerolehan pamrih keuntungan. Inilah sebuah realitas tersendiri yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan di mana jalinan kekuasaan yang terbentuk adalah antara pihak yang berkuasa penuh serta pihak yang dikuasai. Gejala ini dapat pula disebut sebagai sebuah "gegar kuasa" (*power shock*) sebagai akibat hubungan kekuasaan yang terjadi tidak lagi bersifat personal serta emosional, namun lebih didominasi oleh watak kekuasaan yang dingin, impersonal, serta ada segregasi yang sepenuhnya tegas (formal).

Kondisi tersebut juga semakin diperparah oleh intervensi negara untuk terus melanggengkan kekuasaannya dengan cara-cara yang sama sekali tidak etis. Misalnya saja adalah banyaknya kasus pemilihan kepala desa yang selalu melibatkan pihak eksternal (terutama kalangan birokrasi di atas desa serta pihak militer). Intervensi yang terlalu berlebihan ini seringkali membuat masyarakat desa harus menelan kekecawaan yang sangat berat ketika calon pilihan mereka tidak disetujui atau dengan rekayasa kekuasaan tertentu sengaja dikalahkan. Tidak saja otonomi atau kemandirian masyarakat desa yang seakan-akan diabaikan begitu saja dalam kasus-kasus semacam

ini. Sesungguhnya yang justru paling membuat masyarakat desa menunjukkan perasaan marah adalah karena harga diri serta martabat mereka seakan-akan diinjak-injak begitu saja, bahkan dieliminasi bagaikan tidak punya nilai apapun. Negara beserta aparatnya yang merasa mempunyai kekuasaan penuh (*powerful*) secara sewenang-wenang tidak memberikan apresiasi apapun terhadap kehadiran masyarakat desa dalam pentas kekuasaan. Malahan lebih dari itu negara dengan arogansinya yang terlampau berlebihan selalu berlagak menyepelekan (*underestimate*) terhadap sikap politik masyarakat desa yang selalu dipandang serta ditempatkan sebagai pihak yang pasti patuh, tunduk serta tidak akan menolak apapun segala kehendak kekuasaan.

Semua puncak atau titik kulminasi dari perilaku kekuasaan itu adalah pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Sulit untuk dipungkiri oleh siapapun bahwa aparat pedesaan dijadikan mesin politik bagi Golongan Karya (Golkar) untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Rasionalisasi politik yang tertanam dalam benak kader-kader Golkar adalah birokrasi merupakan sebuah sayap yang dapat direntangkan selebar-lebarnya untuk meraup suara kalangan pemilih (*voters*). Birokrasi di tingkat pedesaan, tampaknya, merupakan perangkat yang paling efektif untuk menjalankan rasionalisasi politik tersebut. Hal ini dengan asumsi bahwa masyarakat pedesaan adalah komunitas yang sangat submisif (tunduk serta patuh) terhadap komando kekuasaan dari kalangan birokrat desa. Kebungkaman masyarakat pedesaan diandaikan sebagai kepatuhan yang serba memberikan persetujuan. Padahal, kebungkaman itu, sebenarnya, adalah sebuah dinamit yang siap meledak ketika mendapatkan momentumnya yang tepat. Eksplosi kemarahan yang selama ini dipendam juga tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kalangan birokrat pedesaan melakukan cara-cara yang sebegitu represif untuk mencambuk masyarakat sehingga tergiring dalam kandang Golkar. Sehingga dapat diberikan suatu metafora bahwa selama ini aparat desa berlagak layaknya penggembala yang bengis pada saat momentum pemilu berlangsung, serta sama sekali memperlakukan masyarakatnya sebagaimana layaknya binatang ternak yang sangat dungu.

Dalam banyak kasus yang lain, terutama dalam kasus-kasus pertanahan, aparat desa juga dianggap sebagai perangkat kalangan pengusaha untuk menjinakkan gelombang ketidakpuasan masyarakat desa. Sangatlah tidak mungkin pihak pengusaha sebagai orang yang sama sekali asing bagi masyarakat desa akan melakukan pembelian tanah secara langsung. Pengusaha harus memanfaatkan aparat desa untuk dapat mengeruk tanah yang sedemikian luas dengan harga yang sangat murah. Inilah intervensi permodalan yang bersifat koersif yang selalu mewarnai pembebasan (atau lebih tepat disebut sebagai penjualan secara paksa) lahan pertanian untuk dapat dimanfaatkan sebagai lapangan golf, tempat berlibur, atau juga pabrik-pabrik dalam sebuah proses industrialisasi yang tidak manusiawi. Aparat desa sendiri dengan otomatis juga memperoleh keuntungan material dalam kasus-kasus pembebasan tanah tersebut. Dan, apabila mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukan tindakan persuasi terhadap masyarakatnya sendiri, maka dikerahkan pula aparat militer yang selalu siap melakukan tindakan kekerasan untuk menundukkan ketidakpuasan masyarakat desa tersebut.

Berbagai aksi kekerasan atau setidaknya ancaman yang menimpa kalangan aparat desa, secara keseluruhan dapat disimpulkan akibat disharmonisasi dalam jalinan-jalinan kekuasaan antara pihak birokrat di tingkat pedesaan dengan masyarakat yang menjadi wilayah rengkuhannya. Disharmonisasi tersebut bersumber dari dimanfaatkannya aparat desa untuk kepentingan kekuasaan negara sehingga pihak negara tetap mengalami kelanggengan (*establishment* atau *status quo*). Pelanggengan kekuasaan negara tersebut secara operasional dilakukan oleh Golkar dalam setiap kali momentum pemilu berlangsung dengan menciptakan aparat desa sebagai mesin politik yang dianggap paling efektif. Selain itu, aparat desa juga dijadikan sekadar sebagai perangkat dan komponen yang menguntungkan bagi kepentingan bisnis kalangan pengusaha tertentu untuk mendapatkan profit material sebanyak-banyaknya. Sekarang ini jika aparat desa tersebut memperoleh teror serta bahkan perlakuan fisik yang sangat menyakitkan adalah sebagai imbas yang paling konkret dari "dosa dan noda politik" yang selama ini secara periodik serta sistematis mereka lakukan.

Sebenarnya apabila dilihat secara historis terjadinya aksi kekerasan terhadap kalangan aparat desa di Jawa Tengah tidaklah dapat dikatakan sebagai gejala yang sama sekali baru. Aksi-aksi kekerasan yang sangat revolusioner yang disertai pembunuhan terhadap kalangan aparat desa pernah berlangsung di tiga wilayah kota di

karesidenan Pekalongan, yaitu Brebes, Tegal, serta Pemalang. Aksi-aksi revolusioner rakyat terhadap aparat desa pada tahun 1945 tersebut dikenal sebagai "Peristiwa Tiga Daerah". Anton E. Lucas menggambarkan rangkaian peristiwa tersebut sebagai "*the bamboo spear pierces the payung*" (dalam Surjomihardjo, 1981: 52-61). Pengandaian ini menunjukkan adanya suatu momentum yang dianggap paling radikal ketika "bambu runcing menembus payung" yang secara konkret merupakan sebuah deskripsi dari keberanian masyarakat biasa untuk menyingkirkan kalangan *pangreh praja*. Jika dilihat menurut rentetan waktunya, peristiwa yang terjadi di tiga kota tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian penting setelah Proklamasi Kemerdekaan di mana rakyat tidak sekedar ingin melenyapkan kolonialisme asing. Namun juga yang lebih substansial adalah bagaimana melampiaskan perasaan dendam mereka terhadap kalangan *pangreh praja* yang selama masa penjajahan juga menjadi antek yang turut membantu menciptakan penindasan terhadap masyarakat.

Pelacakan secara lebih mendalam dalam Peristiwa Tiga Daerah juga akan menyajikan suatu realitas historis bahwa kepentingan ekonomi merupakan salah satu akar esensial bagi kemarahan masyarakat. Munculnya kapitalisme Barat di wilayah pesisir utara membawa dampak yang sedemikian luas bagi kehidupan kalangan petani. Di wilayah pesisir tempat bermunculannya pabrik-pabrik gula, kalangan elite birokratis atau *pangreh praja* tersebut seringkali berlaku layaknya pejabat kaum kapital Eropa. Kalangan birokrat ini kemudian berperan sebagai penarik pajak dan pelaksana hukum yang pada akhirnya mengucilkan mereka sendiri. Hal inilah yang menjadikan elite birokrat tersebut tidak dapat membela kepentingan para petani pada satu sisi serta tidak mampu sebagai pegawai kolonial yang baik pada sisi yang lain. Secara sangat mencolok, kepala-kepala desa berperan sebagai tuan-tuan tanah pemungut padi dari para petani. Keadaan ini semakin diperburuk oleh terjadinya korupsi yang mendorong karesidenan Pekalongan menaikkan kuota penyerahan padi. Konklusi yang dapat dibaca dari Peristiwa Tiga Daerah yang melahirkan revolusi sosial pada bulan Oktober 1945 itu adalah akibat peranan agresif para elite birokrat, terutama dalam hubungan pemungutan hasil panen padi.

Apabila rangkaian peristiwa historis tersebut direfleksikan kembali ke masa sekarang ini, terutama selama rezim Orde Baru, maka peranan elite birokrasi di tingkat desa tetap saja dianggap strategis untuk melangsungkan serta melanggengkan sistem kapitalisme. Memang, apabila kapitalisme yang dijalankan adalah murni maka yang terjadi adalah penghindaran peranan elite birokrasi dari eksploitasi terhadap masyarakatnya sendiri, sehingga mereka tidak mengalami keterasingan atau pun pemencilan. Namun, karena yang dijalankan adalah sebuah sistem kapitalisme semu (*ersatz capitalism*), maka satu-satunya cara untuk memuluskan sistem yang eksploitatif tersebut adalah dengan memanfaatkan elite birokrat sebagai mesin uang sekaligus juga sebagai mesin kekuasaan yang otoriter.

Bahkan secara kritis, Ruth McVey mengandaikan negara Orde Baru sebagaimana layaknya sebuah *beamtenstaat*, sebuah sistem pemerintahan kolonial pada tahun 1930-an. Dalam negara dengan sistem semacam ini yang diutamakan adalah ketrampilan berorganisasi, kemampuan teknis serta keahlian di bidang ekonomi. Sedangkan ciri-ciri lain di luar segi teknis administratif birokrasi, menurut McVey adalah: *Pertama*, baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Orde Baru, meskipun yang pertama bersifat sipil sedangkan yang kedua adalah militer, selalu saja mengandalkan secara terbuka kepada kekuatan serta kekuasaan yang memaksa; *kedua*, adanya kecenderungan birokrasi yang mengalami alienasi (keterasingan); dan *ketiga* adalah sikap elite politik yang menganggap rendah terhadap keberadaan rakyat (dalam Rahardjo, 1985: 12). Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa kalangan elite birokrat ini selain mengidap sindroma bahwa dirinya mempunyai kekuasaan yang besar, juga dihinggapi sejenis megalomania (gila kehormatan) dengan melakukan penumpukan kekayaan serta menerapkan cara-cara yang opresif untuk menguasai dan menundukkan masyarakatnya.

Sehingga kalau selama ini ada asumsi serta doktrin yang sedemikian kokoh bahwa birokrasi diterapkan sebagai pemberi layanan masyarakat yang bersifat netral serta sama sekali tidak memihak adalah tidak benar. Birokrasi memang merupakan aparat negara yang pada awalnya dimaksudkan sebagai pekerja yang mengurus persoalan-persoalan teknis operasional yang bersifat administratif. Namun dalam perkembangan berikutnya, birokrasi itu sendiri dengan kewenangan administratifnya dapat menjadi sejenis penguasa yang berdiri sendiri. Hal ini

memuncak pada perilaku yang tidak lagi menjadi pengayom serta pelayan masyarakat, melainkan menjadi sejenis mesin produksi kekuasaan yang berlaku dingin, impersonal, serta melakukan keberpihakan terhadap kalangan yang dinilai mampu memberikan keuntungan materi untuk memupuk kekayaan serta mengawetkan kekuasaan negara yang represif. Dalam penilaian yang diberikan Hamza Alavi, karakter negara semacam ini disebut sebagai Negara Pasca Kolonial. Sebab, dengan masih efektifnya peranan birokrasi yang tersebar luas di seluruh jajaran kelas-kelas dalam masyarakat pada masa kolonial, ternyata, setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan, peranan birokrasi masih juga dimanfaatkan untuk menguasai masyarakat. Perbedaannya adalah negara kolonial melakukan pengindukan terhadap negara asing, sedangkan negara pasca kolonial sudah berdiri sendiri (dalam Budiman, 1996: 107-109). Kesemua ini memberikan pembuktian bahwa birokrasi sebagai perangkat kekuasaan yang terbukti efektif pada masa kolonial kemudian secara kontinyu difungsikan secara total oleh negara yang sudah merdeka.

Refleksi atas seluruh kejadian yang menunjukkan perilaku masyarakat yang bermusuhan terhadap aparat desa, sehingga memunculkan ketakutan yang sedemikian mendalam pada diri kalangan aparat tersebut, sebenarnya, lebih didorong oleh motif pelampiasan kemarahan masyarakat yang sudah sedemikian tinggi terakumulasi. Atmosfer reformasi yang masih berlangsung sampai sekarang ini memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan balas dendam (*revenge*) terhadap kalangan aparat desa yang selama ini tidak menempatkan diri sebagai pelayan serta pengayom masyarakat. Jika pada masa Orde Baru kemarahan tersebut tidak mampu untuk dimuntahkan karena kontrol negara yang sedemikian ketat, maka momentum reformasi menjadi sebuah mekanisme katalisator yang memungkinkan masyarakat seolah-olah boleh berbuat apa saja meskipun dengan cara-cara kekerasan. Apalagi, sesungguhnya, kewibawaan elite birokrasi itu sendiri sejak masa Orde Baru sudah mengalami kemerosotan yang tajam akibat birokrasi disulap sebagai *abdi negara* (yang sangat kental dengan warna kolonialisme) dan bukannya *abdi masyarakat*.

Gejala melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat desanya sendiri serta merebaknya penjarahan merupakan bukti bahwa di pedesaan telah terjadi apa yang dinamakan Emile Durkheim sebagai anomie. Yaitu sebuah kondisi manusiawi yang ditandai oleh tidak adanya peraturan sosial yang merupakan bentuk konkret dari keadaan manusia yang tidak sosial, non-rasional dan tak berbentuk. Sehingga, anomie merupakan sebuah kondisi masyarakat di mana agama, pemerintah dan moralitas telah kehilangan keefektifannya dan keadaan psikologis yang diakibatkannya pada para individu kecewa tanpa tujuan hidup apa pun dan karenanya tak memiliki kebahagiaan tetap (Campbell, 1997: 176). Konklusi yang dapat dikemukakan adalah reformasi yang berupaya merombak sistem politik rezim Orde Baru yang sangat represif, ternyata, belum menunjukkan keberhasilannya sama sekali. Reformasi yang dimaksudkan sebagai pembaharuan serta penyegaran bagi kehidupan politik justru melahirkan anomie yang kemungkinan masih berkepanjangan proses bergulirnya. Anomie tersebut tidak saja terjadi di lingkup pedesaan, namun juga semakin merebak di perkotaan yang ditandai oleh mudahnya kekerasan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi massal serta meningkatnya angka kriminalitas.

Penglupaan terhadap Tragedi Politik

Kekerasan politik yang pernah terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa, tampaknya, akan sengaja dilupakan oleh kalangan pejabat yang pernah terlibat di dalamnya. Tentu saja, pertanyaan yang harus diungkapkan adalah: mengapa perilaku represif negara pada masa silam itu ingin dilupakan? Apakah lupa dalam kondisi perpolitikan yang masih bergejolak seperti sekarang ini, memang, layak untuk dilakukan? Dan, benarkah lupa dalam pokok persoalan ini hanya sekadar suatu proses psikis yang tidak disengaja sama sekali? Dengan demikian, "lupa" hanya menjadi sekadar lawan dari "ingat", sehingga peristiwa-peristiwa perilaku represif negara hanya menjadi sejenis timbunan historis yang sedikit pun tidak berguna dan tidak mempunyai nilai politis yang aktual.

Gejala-gejala untuk secara sengaja melupakan peristiwa-peristiwa politik berdarah di masa lampau tampak dari pernyataan sejumlah tokoh yang dianggap mempunyai peran dominan dalam peristiwa tersebut. Try Sutrisno, misalnya, ketika dimintai tanggapan atas terjadinya Peristiwa Tanjung Priok dan berbuntut kematian penduduk yang tidak sedikit, hanya memberikan komentar: "Lupakanlah peristiwa itu. Kita sekarang sedang menghadapi beban yang

berat di masa reformasi sekarang ini." Bagi Try Sutrisno yang saat itu sebagai Pangdam Jaya, peristiwa Tanjung Priok dapat dilupakannya begitu saja. Ini disebabkan bahwa dirinya sedang duduk dalam kursi kekuasaan serta sama sekali tidak merasakan penderitaan. Sementara, sebaliknya, bagi kalangan penduduk yang dicekam peristiwa pahit itu, barangkali, tidak dapat melupakannya begitu saja. Bagaimana aparat militer dengan aksi-aksi koersifnya menimbulkan kematian, hilangnya orang-orang tercinta, teror fisik dan mental yang terus menyelimuti kehidupan, hak-hak sipil yang dirampas, serta kebebasan berpendapat hanya hilang dalam waktu sekejap dengan sapu bersih melalui metode kekerasan negara; sedemikian tergambar jelas dalam ingatan mereka.

Indikasi yang sama terjadi pula pada saat kontroversi merebak menjelang peringatan Tragedi 27 Juli 1996 yang sudah berlalu yang dikenal sebagai *Peristiwa Sabtu Kelabu*. Kubu PDI Megawati yang hendak merayakan peristiwa yang dianggap mempunyai nilai historis itu dihambat oleh perizinan yang dikeluarkan pihak kepolisian. Sudah pasti, instansi kepolisian bukanlah satu-satunya pihak yang harus dipersalahkan karena tidak memberikan izin. Kepolisian adalah sebuah bagian dari aparatus negara yang secara sistematis dipersiapkan untuk menghadang berbagai perayaan yang dinilai akan membahayakan kekuasaan negara. Sementara itu, Syarwan Hamid yang diduga mempunyai peran yang cukup determinan sehingga melahirkan Tragedi 27 Juli, ketika dimintai komentarnya memberikan jawaban yang serupa dengan Try Sutrisno. Tragedi 27 Juli bagi Syarwan Hamid tidak lebih sebagai kejadian pada masa silam yang sedikit pun tidak layak untuk dikenang. Serta lagi-lagi, isu besar mengenai reformasi dijadikan dalih untuk melupakan peristiwa berdarah itu.

Fenomena apa yang sebenarnya meliputi kalangan pejabat yang di masa lalunya harus bertanggung jawab pada setiap tragedi berdarah, tiba-tiba saja secara mendadak hendak melupakan kepahitan-kepahitan yang diderita masyarakat kebanyakan? Apakah lupa dalam perkaitan permasalahan politik semacam ini menjadi sebuah mekanisme psikis yang tidak sadar? Ataukah lupa merupakan prosesi dari semacam pembenaran untuk melakukan politik cuci tangan, sehingga lepas dari tanggung jawab serta tuntutan hukum yang kemungkinan dikedepankan masyarakat? Jawabannya adalah jelas: bahwa "lupa" dalam arena kontestasi kekuasaan politik seperti ini tidaklah sekadar berkedudukan oposisional dari "ingat". Sebagaimana diungkapkan oleh Milan Kundera bahwa perjuangan untuk melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa (dalam Pabottingi, 1991: 17). Sebab, lupa dalam kontinum persoalan ini adalah sebuah proyek kekuasaan untuk meredam serta membungkam mereka yang pernah ditindas pada masa silam dalam sebuah sejarah perjuangan politik.

Apabila secara kritis dilontarkan sebuah pertanyaan mengapa orang-orang seperti Try Sutrisno, Syarwan Hamid, atau pihak-pihak lain yang pernah menghirup manisnya kekuasaan dengan mekanisme tindakan represif yang berlebihan, selalu ingin melupakan peristiwa-peristiwa politik berdarah itu? Melalui psikoanalisis yang pernah diteorikan oleh Sigmund Freud maka dapat diungkapkan bahwa lupa adalah bagian dari "Id", sebuah bagian paling fundamental dari psikis manusia yang bersifat impersonal atau anonim, tidak disengaja atau tidak disadari, dalam kekuatan-kekuatan substansial yang menguasai psikis manusia. Dalam Id ini berlaku: bukan aku (subyek) yang melakukan, melainkan ada yang melakukan dalam diriku. Sebenarnya, Id itu sendiri terdiri atas naluri-naluri bawaan, khususnya naluri-naluri seksual serta agresif, serta berbagai keinginan yang selalu ditimpali dengan represi. Yang harus juga diperhatikan, Id menurut Freud, hanya melakukan apa yang disukai. Sehingga, Id dibimbing oleh sebuah prinsip kesenangan atau *the pleasure principle* (K. Bertens: 1997, 68-71).

Kontekstualisasi atas paradigma psikoanalisis gaya Freudian terhadap kalangan pejabat yang hendak melakukan penglupaan terhadap perbuatannya di masa silam adalah, bahwa mereka sesungguhnya juga diselimuti oleh perasaan tercekam, takut, tertekan, serta sangat direpresi oleh berbagai tuntutan hukum yang digulirkan oleh kalangan masyarakat. Struktur sosial-politik masa lampau yang menempatkan mereka sekadar sebagai prajurit militer yang harus patuh terhadap perintah atasan, menjadikan mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mengelak. Barangkali saja secara hati nurani (*conscience*) yang bersifat subyektif-individual memberikan kesadaran bagi kalangan pejabat militer tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koersif terhadap perbedaan pendapat yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun, sebuah struktur sosial-politik yang lebih besar dengan segala aturan mainnya untuk menegakkan sebuah kekuasaan otoriter dari rezim Orde Baru, menjerumuskan mereka untuk

menyembunyikan penolakan serta sedikit pun tidak mampu untuk menghindar. Sebuah mekanisme ketidaksadaran kolektif yang sedang dimainkan dalam sebuah lingkup orde kekuasaan, ternyata, menimbulkan konsekuensi tersendiri. Secara lebih jelas adalah para pejabat militer tersebut harus menghapuskan kemampuan subyektif mereka untuk melakukan sebuah pilihan eksistensial yang betul-betul otonom dan merdeka.

Pernyataan untuk melupakan peristiwa-peristiwa berdarah tersebut pada masa sekarang ini, tampaknya, menjadi pilihan yang lebih realistis bagi kalangan pejabat militer tersebut. Perilaku serta tindakan koersif yang ditunjukkan dengan agresivitas untuk menggunakan persenjataan pada masa lampau, dianggap sebagai sebuah beban yang sangat memberati benak batin dan kesadaran mereka. Sehingga harus pula dikatakan bahwa kedudukan mereka dalam struktur kekuasaan politik rezim Orde Baru meniadakan kemampuan mereka untuk berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya sedang berlangsung dalam masyarakat.

Realitas konkret yang sedang bergejolak telah dihimpit oleh berbagai mekanisme ketidaksadaran (*unconsciousness*) yang diinternalisasikan ke dalam kesadaran kalangan pejabat militer tersebut dengan kata-kata suci, seperti stabilitas, keamanan negara, pembangunan bangsa, dan yang sudah pasti adalah bahaya ekstrem kanan-dan-kiri. Padahal, kata-kata suci yang sangat ideologis itu, barangkali saja, tidak lebih sebagai sebuah ilusi besar yang bersifat obsesif. Pada saat mereka menghadapi realitas secara konkret, karena sudah mengalami keberjarakan (*distance*) dengan kedudukan dalam jabatan militer serta masa silam yang sudah terlampaui, barulah mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tindakan-tindakan koersif yang telah mereka lakukan.

Aksi-aksi represif yang mengatasnamakan kepentingan negara pada masa silam, dalam rentang waktu sekarang ini dianggap sebagai beban yang sangat pahit serta sedemikian menyiksa. Mereka ingin melepaskan beban berat dan kepahitan itu dengan cara menyatakan secara berulang-ulang untuk melupakan peristiwa-peristiwa politik berdarah tersebut. Proses untuk melakukan penglupaan ini tidak lain adalah satu-satunya pilihan agar mereka mendapatkan ketenangan, atau yang paling mungkin adalah sebuah kesenangan politik (*political pleasure*). Sehingga lupa dalam persoalan ini adalah sebuah prinsip untuk mencari-cari serta mengais-ngais kesenangan dalam timbunan dosa yang sulit dimaafkan oleh kalangan masyarakat yang sudah sekian lama mengalami penindasan. Tidaklah aneh jika masyarakat dengan geram menyebutkan bahwa mereka hendak lari dari tanggung jawab.

Selain dengan menggunakan perspektif psikoanalisis gaya Freudian, pernyataan-pernyataan untuk melupakan dapat juga ditinjau dengan pendekatan postmodernisme. Hal ini dapat dilacak dengan menyingkap bahwa kalangan pejabat tadi juga ingin menyukseskan arus reformasi yang sedang berjalan. Reformasi jelas menjadi sebuah naskah serta kitab suci lain pada saat rezim Orde Baru sedang digeser. Keagungan narasi yang selama ini menjadi produk unggulan rezim Orde Baru, seperti pembangunan, stabilitas, keamanan, atau mungkin juga persatuan-dan-kesatuan, sudah dianggap usang serta sama sekali tidak relevan dengan tuntutan masyarakat. Narasi Agung (*Grand Narratives*) yang menjadi titik sentral segala kebijakan dan perilaku opresif Orde Baru yang secara nyata dilakukan melalui mekanisme pemaksaan terhadap masyarakat, sekarang justru sedang dirobek serta digantikan oleh narasi besar lain yang bernama reformasi.

Mengapa reformasi dapat dikategorikan sebagai sebuah metanarasi atau pun narasi agung? Ini dapat dilihat dari cara berpikir serta berucap kalangan awam, intelektual, serta pejabat birokrat yang dengan kegenitan luar biasa menyebut-nyebut reformasi untuk menyerang pihak yang dianggap lawan. Reformasi sendiri -- meskipun dalam wujud yang masih berantakan serta *chaos* karena belum menemukan formulasinya yang jelas --, pada puncaknya tidak lebih sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Sehingga sangatlah mungkin apabila reformasi ketika menemukan formatnya yang baku serta diinterpretasikan secara monolitik bernasib sama sebagai senjata represif dari pihak negara untuk menindas masyarakat.

Ironisnya, kesemua prosesi ke arah itu sudah menunjukkan gejala-gejalanya yang sangat faktual. Simak saja kembali pernyataan Try Sutrisno serta Syarwan Hamid yang secara bertubi-tubi mengajak masyarakat untuk selalu mengingat reformasi serta melupakan dosa-dosa politik rezim Orde Baru pada masa lalu. Persoalan substansial yang hendak dikedepankan dengan mekanisme lupa-ingat ini tidak lagi sebatas pada pengaturan kondisi psikis. Melakukan pengingatan terhadap reformasi secara terus-menerus berarti melakukan pemaksaan untuk tunduk pada

sebuah skenario besar yang sedang disiapkan serta ditanamkan ke dalam kesadaran masyarakat oleh pihak yang berkuasa. Sedangkan melakukan penghapusan terhadap kesalahan-kesalahan para penguasa rezim Orde Baru dianggap sebagai sebuah tindakan terhormat. Karena berarti juga membantu membersihkan dosa-dosa politik rezim lama yang sungguh-sungguh tidak terampunkan.

Pergantian dari metanarasi yang satu ke metanarasi yang lain semacam inilah yang, menurut kalangan postmodernis seperti Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard, serta Gayatri Chakravorty Spivak, merupakan sebuah kontinuitas yang tidak dapat dihentikan. Dalam kaitan ini Spivak menandakan bahwa ketika sebuah cerita atau narasi agung dikisahkan, maka narasi agung yang lain dilupakan (dalam Laksana, 1996: 66-68). Maka yang harus selalu dikritisi adalah berbagai kemungkinan selalu munculnya sebuah sentrum (pusat) yang kebenarannya selalu hendak dipaksakan, terutama melalui cara-cara yang represif. Apabila tradisi modern semacam ini terus diwariskan dan menemukan tempatnya untuk berkembang biak, apa yang disebut sebagai toleransi akan selalu dinihalkan. Ini disebabkan bahwa pihak yang dianggap lawan diposisikan sebagai yang lain (*the other*), sehingga keberadaannya harus dicurigai serta kalau mungkin adalah dibunuh dan dimatikan.

Bukankah, dengan demikian, perjalanan waktu politik yang bermuatan nilai kesejarahan seperti itu tidak lebih sebagai rentetan peristiwa yang selalu diliputi serta digenangi oleh dari penindasan yang satu ke penindasan berikutnya, yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan yang tanpa henti bagi kalangan awam masyarakat? Benar. Namun, Walter Benjamin, seorang filsuf beraliran kritis dari Mazhab Frankfurt, memberikan penegasan bahwa sejarah janganlah selalu ditempatkan secara linear, sehingga melupakan masa lalu. Masa lalu yang terjadi dalam sebuah sejarah bukanlah sesuatu kejadian yang mesti ditinggalkan. Melakukan pengingatan terhadap masa lalu dari mereka yang menderita adalah sebuah sumber inspirasi untuk melakukan penyelamatan pada masa sekarang terhadap kalangan masyarakat yang tertindas (Sindhunata dalam Susanto [ed.], 1994: 199-214). Kesemua ini tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak dilakukan "politik pengingatan" terhadap masa lampau tersebut.

Demikianlah, maka seharusnya sebuah memori dari peristiwa politik berdarah di masa lampau tidak selayaknya diselubungi dengan mekanisme penghapusan yang dangkal dengan dalih apapun, misalnya reformasi. Apalagi dalih ini sekadar untuk menghapus sebuah memori karena telah kuatnya peranan sejumlah pihak yang pernah merasakan nikmatnya sebuah kekuasaan. Dilakukan penghapusan dan penghapusan terhadap memori peristiwa politik berdarah itu melalui cara apa saja, sesungguhnya, tetap tidak akan mampu membersihkan bercak-bercak noda mereka yang melakukan penindasan. Sebab, mereka yang telah ditindas, dibunuh, serta dikuburkan itu masih tetap menyisakan tenaga progresif besar bagi generasi sekarang dan mendatang tentang pembelaan dan pembebasan bagi mereka yang mengalami tindakan-tindakan represif.

Penderitaan mereka yang tertindas menjadi sebuah memori yang mampu bercerita dengan sendirinya mengenai kekuasaan yang menunjukkan arogansinya melalui pengerahan kekuatan bersenjata yang koersif. Begitulah, maka terbunuhnya Marsinah, Peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Lampung, Tragedi 27 Juli, atau kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 yang mengakibatkan pembunuhan dan pemerkosaan, serta kasus-kasus lain yang sempat tidak diungkapkan secara publik, merupakan memori yang harus selalu diziarahi serta diperingati. Proyek penghapusan yang hendak dilakukan kalangan aparat negara dengan mengatasnamakan reformasi, sebenarnya, tidak lebih sekadar sebagai upaya untuk menghancurkan mereka yang benar-benar ditikam penindasan dan penderitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K.
1997 *Etika*, Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief
1996 *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia.

- Campbell, Tom
1997 *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius.
- Foucault, Michel
1997 *Seks & Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Gramedia.
- Laksana, Bagus
1996 "Resensi Buku: The Post-Colonial Critic" dalam *Driyarkara* No. 2 Tahun XXII (1996), hal. 66-68.
- Nietzsche, Friedrich
1998 *Ecce Homo: Lihatlah Dia*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pabottingi, Mochtar
1991 "Komunikasi Politik dalam Transformasi Ilmu Politik" dalam *Prisma* No. 6 Tahun XX (1991), hal. 13-26.
- Rahardjo, M. Dawam
1985 "Gerakan Rakyat dan Negara" dalam *Prisma* No. 11 Tahun XIV (1985), hal. 3-15.
- Sindhunata, G.P.
1994 "Memoria Passionis: Walter Benjamin dan Teologi Politik" dalam Budi Susanto, SJ (ed.), *Teologi & Praksis Komunitas Post Modern*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 199-231.
- Surjomihardjo, Abdurrahman
1981 "Peristiwa Tiga Daerah, Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan" dalam *Prisma* No. 8 Tahun X (1981), hal. 52-61.